

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|---------|
| Media Cetak | Solopos |
| Media Online | |

Wilayah: Kabupaten Sragen

Halaman 13

Premi Naik, Dana Jamkesda Jadi Rp30 M

TRI RAHAYU

SRAGEN—Anggaran untuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Sragen pada 2021 mencapai Rp30,07 miliar. Jumlah itu naik bila dibandingkan alokasi 2020 yang terealisasi senilai Rp22,46 miliar.

Naiknya anggaran tersebut disebabkan kenaikan premi BPJS kesehatan kelas III dari Rp23.000/bulan menjadi Rp42.000/bulan.

Anggaran tersebut digunakan untuk membayar premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi warga yang tidak mampu di Kabupaten Sragen baik yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun non-DTKS.

Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Sragen, Tri Mulyono, saat dihubungi *Espos*, Jumat (12/2/2021), menjelaskan anggaran premi BPJS Kesehatan pada Jamkesda Sragen itu naik karena nilai preminya juga naik per 1 Januari 2021. Premi penerima biaya iuran (PBI) dari APBD Kabupaten Sragen untuk BPJS

Kesehatan kelas III yang semula Rp23.000/bulan/orang naik menjadi Rp42.000/bulan/orang mulai 2021. "Jadinya anggaran naik dari Rp22 miliar menjadi Rp30 miliar itu ya pantas," ujarnya.

Warga miskin yang masuk DTKS itu ada yang belum menjadi PBI dari APBN. Trimul, sapaan akrabnya, mengatakan sebaliknya ada yang menerima PBI APBN untuk BPJS Kesehatan tetapi belum masuk DTKS. Trimul menerangkan dana warga miskin dalam DTKS yang belum terkover PBI APBN itu masih 80.000-an orang. Anggaran Rp22 miliar pada 2020 yang mengkaver

premi untuk 55.614 orang itu sebenarnya tidak semua masuk DTKS.

Dia menjelaskan data penerima PBI BPJS Kesehatan dari APBD Sragen sebanyak 55.614 orang itu masih data campur dengan warga miskin, yakni data yang masuk DTKS dan data warga miskin yang belum masuk DTKS.

"Data itu belum bisa dipilah. Selain itu, daerah mulai 2021 juga menyubsidi premi peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas III senilai Rp2.800/orang. Subsidi itu dialokasikan Rp2 miliar. Ada juga wacana peserta BPJS Kesehatan yang selama ini ditanggung APBD Provinsi Jawa Tengah akan dilepas dan diserahkan ke daerah. Padahal jumlahnya mencapai 4.000-an orang," ujarnya.

Trimul sampai pusing bila menghitung kebutuhan anggaran

daerah untuk mengkaver premi BPJS Kesehatan bagi warga miskin. Dia berharap wacana dari pemerintah pusat untuk menambah kuota PBI APBN untuk membiayai BPJS Kesehatan warga miskin yang masuk DTKS sebanyak 24.000 orang itu benar-benar bisa terwujud.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Tatag Prabawanto mengatakan anggaran Jamkesda khusus membiayai premi BPJS Kesehatan bagi warga miskin. Dia mengatakan jumlah data warga miskin terus naik dan anggarannya menyesuaikan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen Hargiyanto mengatakan DKK mengajukan anggaran Jamkesda itu sesuai dengan aturan. Dia mengakui alokasi anggaran 2021 naik dari semula Rp22 miliar menjadi Rp30 miliar.

| JAMINAN KESEHATAN DAERAH UNTUK PREMI BPJS KESEHATAN DI SRAGEN | | |
|---|------------------|---------------------|
| Tahun | Anggaran | Jumlah Peserta BPJS |
| ▶ 2020 | Rp22.460.184.500 | 55.614 orang* |
| ▶ 2021 | Rp30.075.830.660 | 55.614 orang* |

Keterangan:
*Data terakhir per Desember 2020

| ANGGARAN JAMKESDA SARASWATI DI SRAGEN | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tahun | Anggaran | Jumlah Penerima |
| ▶ 2020 | Rp4.906.683.549 | 19.432 orang |
| ▶ 2021 | Rp387.337.920 | 0 orang* |

Keterangan:
*Belum ada laporan realisasi

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen (7/1)